

Pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi: kasus tentang Penundaan Revisi UU Pemerintahan Daerah oleh APKASI 2001-2004

M.P. Dwi Widiastuti, author

Deskripsi Dokumen: <https://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=111546&lokasi=lokal>

Abstrak

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan sebuah organisasi bare di Indonesia yang dapat dijadikan sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan Pemerintah Kabupaten serta menjalin solidaritas dalam rangka memperkuat kesatuan nasional. APKASI mempunyai pecan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan Otonomi  daerah, dan mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan aspirasi dari seluruh Pemerintah Kabupaten yang menjadi anggotanya.

Selama kurang lebih 3 tahun APKASI secara tegas dan konsisten telah menyatakan sikapnya kepada Pemerintah Pusat dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Walaupun pada akhirnya UU 2211999 direvisi oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2004, namun gaung dan perjuangan APKASI dalam penundaan revisi dinilai lebih menonjol daripada Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Permasalahan penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan di APKASI yang dirumuskan dalam tiga permasalahan penting yaitu bagaimana APKASI melakukan komunikasi dengan anggotanya, bagaimana hubungan antar anggota di dalam proses pembuatan keputusan Asosiasi, dan bagaimana pengaruh tersebut terhadap keanggotaan APKASI terhadap partisipasinya di dalam proses pembuatan keputusan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi di APKASI, dan dukungan yang diberikan dalam upaya penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data-data sekunder dan studi pustaka.

Kesimpulan penting yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah interaksi komunikasi seperti yang terdapat dalam struktur organisasi APKASI tidaklah cukup untuk membangun komunikasi interpersonal, apabila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang kontinyu untuk seluruh anggota.

Struktur komunikasi di APKASI menunjukkan struktur jaringan komunikasi yang kurang terpusat (struktur Y), dan struktur semua saluran yang memungkinkan setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya terutama di tingkat KORWIL. Sifat arus informasi yang serentak dan berurutan dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan APKASI. KORWIL mempunyai peran yang besar untuk penyampaian informasi yang berurutan dan umpan balik dalam pembuatan keputusan organisasi.

Pola dasar arus informasi yang memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tidak berjalan efektif karena perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi dan jarak antar anggota secara

geografis. Komunikasi melalui surat-menyurat dan penggunaan teknologi komunikasi (seperti telepon, faksimili, e-mail) menjadi sarana interaksi komunikasi utama.

Tiga bentuk jaringan komunikasi yaitu bentuk jaringan vertikal dua arah, horisontal (lateral), dan diagonal dilakukan oleh APKASI. Bentuk jaringan diagonal terbukti menjadi jaringan komunikasi yang memberikan kontribusi besar dalam komunikasi interpersonal di APKASI dengan partisipasi dan kerjasama dari para Pejabat dan Staff di jajaran Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang relevan.

Masa pergantian jabatan di Pemerintah Daerah, permasalahan-permasalahan daerah, dan terhambatnya informasi dan lingkungan merupakan gangguan (noise) yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan dalam memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasi karakteristik penting adanya hubungan interpersonal yang berbeda-beda dalam hal keluasaan dan kedalaman.

Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah dipengaruhi adanya power yang melekat kepada Bupati, yang mempunyai posisi sebagai Dewan Pengurus Asosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan persuasi untuk mengontrol perilaku anggota Asosiasi. Pembuatan keputusan di APKASI merupakan proses dimana para anggota berusaha mencapai konvergensi yang ditempuh melalui musyawarah dan atau pemungutan suara.